



Indonesia sebagai *Narco-Corruption State*

Poltak Partogi Nainggolan^{*)}

Abstrak

Kegiatan illegal trafficking of illegal drugs and narcotics memperlihatkan kecenderungan meningkat drastis akhir-akhir ini dan telah memberi ancaman yang serius terhadap keamanan, terutama keamanan insani (human security) Indonesia. Kegiatan yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional ini harus segera direspons pemerintah secara maksimal, jika ingin Indonesia tidak menjadi sebuah narco-corruption state seperti negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Lemahnya hukum dan korupsi sistem yang membawa negara menuju negara gagal, lebih cepat membawa Indonesia sebagai narco-corruption state, jika kondisi ini tidak segera diperbaiki secara komprehensif.

Pengantar

Kemiskinan yang parah dan tidak terkoreksi, kriminalitas yang sangat tinggi, dan kondisi ketidakpastian panjang dalam transisi demokratis telah membawa banyak negara di Afrika menuju negara gagal (*failed states*). Dengan pemimpin sipil yang lemah, perkembangan ini telah membuat para penyelundup dan bos kartel narkoba mudah melakukan bisnis mereka. Korupsi yang akut di berbagai bidang, absennya penegakan hukum, dan reformasi sektor keamanan membuat para bos kartel (*drugs kingpin*) mengendalikan negara, termasuk yang di-*backing*-i perwira militer yang muncul pada era peralihan. Kombinasi merebaknya narkoba dan korupsi di benua Afrika telah menciptakan negara-negara narco-korupsi (*narco-corruption*

states) yang parah. Penetrasi terjadi hingga tingkat atas di kantor kepresidenan, karena keuntungan bisnis narkoba mengalir ke sana, seperti dalam kasus Guinea Bissau, dan negara-negara kunci seperti Ghana, Kenya, Afsel (O'Regan, 2012).

Bagaimana Indonesia dalam era transisi demokratis yang berkepanjangan? Melihat perkembangan realistik yang terjadi, Indonesia yang cenderung ke negara gagal, juga bisa terjerembab menjadi negara *narco-states*, seperti negara-negara Afrika Barat dan Amerika Latin, yaitu Meksiko, Kolombia, Guatemala, dan El Salvador.

Potensi Indonesia

Peningkatan kejahatan narkoba secara drastis belakangan, dari segi kuantitas dan

^{*)} Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: pptogin@yahoo.com

kualitas, telah membuat Indonesia berada di bawah ancaman darurat narkoba. Bahkan DPR juga telah sampai pada penilaian bahwa Indonesia kini dalam kondisi darurat narkoba, mengingat tingginya angka penyelundupan, pemakaian, produksi, serta (ancaman) kerugian yang diakibatkannya. Catatan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2008, misalnya, menunjukkan bahwa total korban narkoba di Indonesia 3,2 juta orang. Dalam 3 tahun (tahun 2011) menjadi 3,6 juta orang, dan 3,8 juta pada awal tahun 2012, atau 2,2% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, yang 1,1 juta orang adalah pelajar. Setiap tahun, sebanyak 15 ribu pemuda di Indonesia tewas akibat narkoba, dengan rata-rata 50 orang meninggal setiap harinya.

Kasus yang ditemukan begitu tinggi. Di Jakarta Barat, misalnya, dari Januari hingga April 2012 terdapat 350 kasus, atau sekitar 100 kasus penyalahgunaan narkoba setiap bulan. Kasus yang ditemukan beragam, mulai dari pemakaian, pengedaran, hingga produksi. Catatan kepolisian memperlihatkan, hampir setiap saat ada pemakai baru.

Modus pemakaian, mulai dari coba-coba, ketagihan, hingga jadi konsumen tetap. Namun, yang mengkhawatirkan, orang tergiur jadi pengedar narkoba karena upah yang besar. Seorang pendatang baru pengedar mengaku memperoleh Rp 15 juta per minggu sebagai kurir. Perbedaan harga yang ekstrim di negara produsen utama, seperti Iran, dan pasar potensial Indonesia yang tinggi mendorong semakin banyak pemain bisnis narkoba internasional. Contoh, harga 1 kg sabu di Iran sekitar Rp 100 juta, jika sampai di Indonesia mencapai Rp 1,5 milyar, atau meningkat 15 kali lipat.

Dari perspektif ekonomi, tercatat kerugian lebih Rp 50 triliun per tahun, dengan jumlah angka kejahatan yang meningkat dari 26 ribu kasus pada tahun 2010 menjadi 29 ribu pada 2011. Sementara, di kalangan kepolisian, yang seharusnya berperan memerangi kejahatan narkoba sebagai aparat penegak hukum,

sejak Januari sampai Maret 2012, terdapat 45 anggota kepolisian tersangkut narkoba, dengan kasus mencolok melibatkan seorang Kapolsek. Pada tahun 2011, ada 227 polisi yang terlibat dengan 102 kasus temuan. Peredaran narkoba telah sampai ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Dalam sebuah kasus, dari 176 sipir yang dilakukan tes urine, 11 orang terbukti positif menggunakan narkoba. Bahkan, dari 596 warga binaan, 144 terbukti melakukan hal yang sama.

Mengingat semua lini sudah terancam, terutama pemuda dan anak-anak, yang merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia yang merupakan ke-4 terbesar di dunia, bukan mustahil jika negara ini dapat berkembang statusnya menjadi salah satu dari *narco states* atau *narco-corruption states*. Potensi Indonesia, selain disebabkan kecenderungan negeri ini menuju *failed state*, juga karena posisi geografisnya sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan jumlah pulau 13 ribu lebih, yang menyebar dengan garis pantai terpanjang di dunia, yang sulit dikontrol. Dengan perbatasan darat dan laut lebih dari 10 negara, menyebabkan banyak jaringan narkoba internasional bisa menjangkau seluruh wilayah negeri, seperti dari Batam, Nunukan, kawasan Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Terakhir, jaringan narkoba dengan kreatifitas barunya membuka jalur yang tidak terpikirkan selama ini, yakni menggunakan perairan Selat Sunda, melalui kawasan Ujung Genteng dan Banten, mengikuti jalur penyelundupan orang asal Timur Tengah. Para kartel internasional menggunakan kurir dan modus lebih beragam, seperti memanfaatkan istri yang dikawin siri, menyembunyikan dalam pencernaan, memasukkan dalam bahan makanan, pakan ternak, bahan baku obat, dan mebel dengan kedok ekspor-impor, serta memproduksi narkoba di apartemen mewah di pusat kota.

Kolaborasi dengan jaringan terorisme internasional yang banyak kelompok dan potensial berkembang *single actor-*

nya, yang menjadikan Indonesia *safe haven*, menciptakan ancaman yang lebih berbahaya, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kawasan. Kegiatan *narcoterrorism* bukan pula hal yang mustahil terjadi di Indonesia, jika kaum teroris semakin kesulitan mencari sumber dana bagi aktivitasnya, di luar dari merampok toko-toko emas dan orang kaya.

Dalam sebuah penangkapan di apartemen tengah kota yang cukup mahal, seorang pelaku mengaku mengedarkan 1 juta ekstasi pada tahun 2007. Hasil penggrebekan pabrik ekstasi di Serang, Banten, yang telah dikelola warga multinasional (Cina, Belanda, dan Prancis), menemukan pabrik itu memproduksi 200 ribu butir per hari. Pabrik itu merupakan pabrik terbesar ketiga di dunia setelah di Fiji dan Cina. Lalu, dari seorang warga Malaysia yang terlibat sindikat perdagangan psikotropika, telah disita 410 ribu pil ekstasi senilai Rp 41 miliar pada tahun 2008. Dalam kasus lebih baru, pada tahun 2010, seorang warga AS terungkap mengedarkan sabu sebanyak 5.668 kg di Indonesia.

Pelajaran dari Mexico

Pemerintah Mexico di bawah Felipe Calderon, telah membangun aparat keamanan baru yang efektif untuk perang melawan kartel narkoba. Aksinya dalam memerangi para kartel itu membawa hasil besar menjelang akhir masa tugasnya. Lima tahun lalu, ketika baru bertahta, terdapat belasan kartel obat bius besar, yang setiap darinya merupakan perusahaan bisnis selain sebagai organisasi kriminal yang ditakuti. The Gulf, the Juarez, La familia Michoacana, the Sinaloa, dan Kartel Tijuana adalah beberapa di antaranya yang berkuasa sampai mancanegara.

Seperti kasus di banyak negara, kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan aparat keamanan dalam memerangi narkoba, termasuk AS, terkontaminasi bisnis narkoba, karena

korupnya sistem. Karena itulah bisnis kotor mafia yang sulit diberantas telah memunculkan Dirty Harry, karena hilangnya harapan pada aparat. Calderon dalam aksinya tidak bersandar pada polisi federal Mexico. Di Mexico, para kartel telah menyuap tidak hanya komandan polisi tingkat wilayah, tetapi juga atas, sehingga polisi negara tidak bisa dipercaya. Mereka bukan saja tidak mau bekerja sama, tetapi terlibat melindungi para kartel dan bosnya (Bonner, 2012).

Militer dapat membantu pemerintah dalam memerangi organisasi kartel narkoba yang punya kekuatan besar. Namun, semua tidak bisa diserahkan pada militer, karena tetap diperlukan kepolisian untuk patroli atas wilayah perkotaan, mengumpulkan data inteljen dan bukti yang diperlukan untuk menyidik para penyelundup narkoba. Calderon segera mereformasi institusi penegak hukum, yang selain membangun kekuatan polisi federal dan negara yang baru dan profesional, juga mengganti aparat yang korup. *The Agencia Federal de Investigacion*, yang dilikuidasi pada Mei 2009, diganti kekuatan baru di bawah Menteri Keamanan dan Keselamatan Publik. Kemudian, ia juga merombak sistem hukum dan pengadilan.

Strategi perang baru dijalankan dengan membuat sistem jaringan informasi kejahatan nasional, yang tugasnya antar lain menyimpan sidik jari setiap pelaku kriminal yang telah dipenjara. Kerja sama dengan militer diperbaiki, sehingga polisi federal dapat mem-BKO pimpinan tentara strategis di berbagai daerah untuk memerangi kartel. Restrukturisasi kepolisian nasional dilakukan, termasuk dengan melakkan pelatihan yang butuh waktu beberapa tahun. Sistem pengadilan kriminal dibuat lebih transparan, dengan membuat pengadilan yang terpantau publik. Sementara, penjara dengan sistem pengamanan yang maksimum dibuat.

Calderon juga meniru cara Kolombia memerangi kartel narkoba pada tahun 1990-an, dengan menerapkan *kingspin strategy*.

Caranya memanfaatkan kelemahan para kartel, yaitu, mengintersepsi jaringan komunikasi mereka, merusak sistem suplai dan distribusi bahan dasar pembuatan narkoba, dan menyita aset bos kartel. Sekali kelompok (kartel) tertentu dilemahkan, polisi dapat menemukan dan menangkap anggota penting lain dari organisasinya, termasuk calon pewarisnya yang potensial. Dalam 3 tahun terakhir, dengan strategi ini, Calderon dapat menangkap atau membunuh lebih 40 pemimpin utama atau pemain kunci kartel. Beberapa lagi telah sangat dilemahkan atau dihancurkan. Di luar ini, masih dibutuhkan upaya agresif menyita aset para bos kartel, tidak hanya yang digunakan dalam mendukung aktivitas kejahatan mereka, tetapi termasuk rumah, pesawat, kapal, mobil, dan bisnis legal mereka (Bonner, 2012). Sebab, di Honduras, negara yang paling berbahaya di dunia, di luar Afghanistan dan Pakistan karena aksi-aksi terorismenya, para kartel narkoba dapat dengan mudah memindahkan narkoba dari kapal laut ke pesawat pribadi, atau kapal cepat, dan bahkan kapal selam yang disebut *narco-sub*s.

Penutup

Tanpa segera mengikuti aksi tegas Calderon, Indonesia akan mengikuti jejak Meksiko sebagai negara narkoba yang berbahaya. Jalan-jalan, sudut-sudut kota, dan wilayah pedalaman, seperti juga di kawasan negara Amerika Latin lainnya, dalam hitungan beberapa tahun, akan berubah menjadi kawasan paling berdarah di dunia akibat aksi kartel narkoba dengan jaringan internasionalnya yang meluas dan kuat. Jakarta, dengan geng motor dan teroris merangkap perampok, tidak mustahil bisa menjadi San Pedro Sula, sebagai kota

terkejam di negara paling mematikan di dunia, Honduras. Seperti di sana, geng-geng narkoba kejam dapat berbuat sesuka hati mereka di Indonesia yang dulu dikenal sebagai negeri yang aman dan damai. Jalur Kepulauan Riau-Jawa atau Batam-Jakarta dapat berkembang menyerupai jalur Meksiko-Brasil yang sangat berbahaya dan tidak aman. Geng-geng narkoba atau anggota kartel mereka akan dengan santai menenteng AK-47 dan memegang granat di jalan-jalan, dan lalu-lalang di siang bolong mengeksekusi target mereka. Di negara Amerika Latin, tingkat pembunuhan penduduk mencapai 86 kasus dari 100 ribu orang. AS sendiri sebagai negara besar telah menggelontorkan lebih 6 milyar dollar AS sejak tahun 2000 untuk membantu pemberantasan narkoba di Kolombia. AS menjadi biasa menggelar operasi militer lintas-negara dengan atau tanpa kerja sama (unilateral), dengan mengerahkan pasukan khusus terbaik seperti *Navy Seals*. Namun, upaya semahal ini baru bisa mencegah 1/3 saja dari narkoba yang masuk ke negaranya dari halaman belakangnya. Karena itu, pemerintah Indonesia sebaiknya cepat mengantisipasi berkembangnya Indonesia ke kondisi buruk ini sebelum terlambat dan kian babak belur akibat absennya penegakan hukum.

Rujukan:

1. Bonner, Robert. C. "Cracking the Mexican cartels," *International Herald Tribune*, 4 April 2012: 6.
2. Fitri, Anita Syah. "Indonesia Darurat Narkoba," *Media Indonesia*, 15 Maret 2012: 6.
3. O'Regan, Davin. "Narco-states: Africa's net menace," *International Herald Tribune*, 13 Maret 2012: 6.
4. "Tiap Bulan 100 Kasus Penyalahgunaan Narkoba," *Kompas*, 17 April 2012: 26.